

LEMBAR INFORMASI NOMOR 11

UNDP dan MASYARAKAT ADAT

Program Pembangunan PBB (*United Nations Development Programme, UNDP*) adalah organisasi PBB yang mempromosikan program-program untuk pembangunan berkelanjutan bagi manusia. Tujuan utama UNDP adalah untuk memberikan rekomendasi untuk pembangunan, advokasi dan memberikan dana-dana bantuan kepada negara-negara berkembang. Dengan kantor perwakilan di 132 negara di seluruh dunia, komitmen UNDP untuk eksis secara universal telah terbukti, dan organisasi tersebut dirasakan sangat bermanfaat khususnya di lokasi-lokasi pasca konflik dan di negara-negara yang sebelumnya telah dikucilkan dari masyarakat internasional.

Pada bulan September 2000, dalam KTT Millenium PBB, para pemimpin dunia berjanji untuk mengurangi separuh jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan pada tahun 2015. UNDP memegang peranan utama dalam mengupayakan komitmen tersebut dengan menyediakan jasa-jasa konsultasi kepada negara-negara berkembang dan membangun koalisi di tingkat nasional, regional dan internasional untuk melakukan perubahan tersebut. UNDP mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, badan-badan khusus PBB, masyarakat sipil, organisasi-organisasi dan institusi-institusi swasta untuk mengimplementasikan program-program pembangunan ekonomi dan sosial. UNDP memiliki keahlian khusus di bidang-bidang pemerintahan demokratis, kebijakan-kebijakan yang mendukung kaum miskin, energi dan lingkungan, mengupayakan perdamaian dan penanganan bencana, HIV/AIDS, serta informasi dan teknologi komunikasi. UNDP juga terlibat dalam berbagai kegiatan advokasi mengenai masalah kemiskinan. Laporan utama yang dihasilkan oleh UNDP, Laporan Pembangunan Manusia atau *Human Development Report*, merupakan laporan yang paling banyak dikutip, menimbulkan banyak debat di tingkat internasional dan nasional tentang masalah-masalah kunci dalam pembangunan seperti kemiskinan, globalisasi dan hak-hak asasi manusia.

Salah satu kunci utama dalam tugas yang diemban oleh UNDP adalah mengembangkan kemitraan. Sebagaimana yang disampaikan oleh pemimpin UNDP bahwa kemitraan antara para aktor pembangunan merupakan prasyarat bagi pembangunan yang efektif. Tantangan utama yang dihadapi UNDP adalah membangun institusi tersebut menjadi organisasi dengan banyak jaringan yang dapat menciptakan berbagai peluang-peluang baru untuk pembangunan melalui kemitraan yang strategis. UNDP berupaya membangun kemitraan yang lebih kuat antara masyarakat sipil dan Organisasi Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples' Organisation*) sebagai landasan mempromosikan perspektif alternatif atas pemikiran-pemikiran pembangunan konvensional. Perubahan sosial dapat terjadi hanya ketika alternatif yang selaras dan memuaskan dapat dikembangkan, dan UNDP, dalam kemitraannya dengan masyarakat adat dapat membantu menciptakan alternatif tersebut.

UNDP juga mengelola sejumlah dana-dana khusus, diantaranya Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan (*United Nation Development Fund for Women, UNIFEM*), Volunter PBB (*United Nations Volunteers, UNV*) dan Kantor untuk Mengatasi Desertifikasi dan Kekeringan (*Office to Combat Desertification and Drought, UNSO*).

UNDP merupakan pendukung program dunia untuk HIV/AIDS. UNDP bersama dengan UNEP dan Bank Dunia merupakan mitra Bantuan Lingkungan Dunia (*Global Environment Facility*, GEF), yang menyediakan dana untuk menangani masalah-masalah lingkungan dunia.

UNDP di kelola oleh 36 anggota Badan Eksekutif, yang merupakan wakil-wakil pemerintah baik dari negara-negara berkembang dan negara-negara maju. UNDP bertemu sekali dalam setahun di kantor pusatnya di New York. Sebagai organisasi bantuan pembangunan multilateral yang terbesar di dunia, UNDP memiliki 132 kantor perwakilan yang dipimpin oleh para Wakil Tetap atau Koordinator. UNDP bekerja dengan masyarakat dan pemerintah di 175 negara dan wilayah di semua region di dunia.

UNDP dan Masyarakat Adat

Keterlibatan UNDP dengan masyarakat adat di tingkat negara sangat luas. Sejak peluncuran Tahun Internasional PBB untuk Masyarakat Adat pada tahun 1993, banyak program dana hibah UNDP dalam jumlah kecil dan program-program lainnya di tingkat regional dan nasional, yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat adat. Program-program tersebut meliputi program pengentasan kemiskinan, koservasi lingkungan, pencegahan dan penyelesaian konflik, dan revitalisasi adat. Selain itu, UNDP juga mendukung proyek-proyek di bawah Program Pengetahuan Tradisional yang tujuan utamanya mempromosikan pengetahuan tradisional melalui pengembangan kapasitas kepada kelompok-kelompok tertentu dan dukungan langsung pada proyek-proyek yang disusun dan dilaksanakan oleh organisasi-organisasi masyarakat adat.

Sejak tahun 1999, UNDP telah terlibat dalam mengaktifkan kembali program-program UNDP yang menyangkut masyarakat adat. Tujuan utama dari keterlibatan UNDP dengan masyarakat adat adalah untuk mengintegrasikan persepektif masyarakat adat dan konsep pembangunan ke dalam program-program selanjutnya, dan untuk memasukkan permasalahan dan isu-isu masyarakat adat dalam pertimbangan wilayah prioritas dan pekerjaan UNDP. Inisiatif baru lainnya adalah eksplorasi peran masyarakat adat dalam pencegahan konflik dan membangun perdamaian. UNDP telah mengupayakan dilakukannya studi kasus yang menganalisa peran gerakan masyarakat adat dalam pencegahan konflik dan membangun perdamaian di seluruh dunia, untuk digunakan sebagai petunjuk kegiatan untuk yang dilaksanakan di lapangan. Dalam melakukan kemitraan dengan badan-badan PBB lainnya, UNDP mengevaluasi cara terbaik untuk mengatasi masalah informasi, jaringan dan pengembangan kapasitas menyangkut persiapan-persiapan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat adat untuk Forum Permanen untuk Masyarakat Adat (yang telah disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial pada bulan Juli 2000).

Program-Program Global

Banyak proyek-proyek yang didukung oleh UNDP yang menempatkan masyarakat adat dalam katagori penerima dana hibah. Beberapa program tersebut bersifat global, dilakukan di berbagai belahan dunia, dan program dana hibah tersebut umumnya dalam jumlah kecil. Program-program dirancang dengan tujuan untuk mempromosikan proses membangun konsensus bersama dan pengambilan keputusan

secara partisipatif. Program tersebut kemudian disusun dan dilaksanakan secara desentralisasi. Struktur pengelolaan program yang partisipatif sudah merupakan bagian tak terpisahkan dari inisiatif-inisiatif serupa lainnya. Program dana hibah dalam jumlah kecil tersebut umumnya melibatkan bimbingan langsung kepada komunitas lokal melalui berbagai LSM dan organisasi berbasis kemasyarakatan. Organisasi-organisasi masyarakat adat, serta organisasi lainnya, dapat mencari dana melalui Program Dana Hibah dalam jumlah kecil GEF, yang memberikan dukungan kegiatan-kegiatan kepada LSM dan kelompok masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan dalam skala kecil. Jaringan 2000 Afrika atau *Africa 2000 Network* yang terdapat di Afrika, menyediakan dana untuk proyek-proyek yang mendukung kelompok-kelompok masyarakat, LSM -termasuk organisasi masyarakat adat-, dan institusi-institusi teknis. Kegiatan proyek terdiri dari bimbingan langsung, seperti pelatihan dan tukar-menukar informasi yang dirancang untuk melindungi lingkungan Afrika dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang pada tingkat akar rumput.

Sejak disahkannya **Agenda 21** (agenda untuk pembangunan yang berkelanjutan yang disahkan pada Konferensi PBB untuk Pembangunan dan Lingkungan atau KTT Bumi), terdapat kewajiban tertulis bagi negara-negara peserta KTT untuk memperhatikan nasib masyarakat adat. Untuk mendukung hal ini, sebagaimana yang tercantum dalam Agenda tersebut, suatu dana **Kapasitas 21 or Capacity 21** ditetapkan untuk membangun kapasitas negara-negara berkembang agar dapat mengintegrasikan konservasi lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan lebih baik. Kapasitas 21 memberikan dukungan untuk merancang kebijakan dan program-program pembangunan berkelanjutan, banyak diantaranya melibatkan berbagai komunitas masyarakat adat.

Program Pengetahuan Masyarakat Adat

Program Pengetahuan Adat (*Indigenous Knowledge Programme*) merupakan inisiatif Jaringan Keanekaragaman Hayati Masyarakat Adat (*Indigenous People's Biodiversity Network*) yang bertujuan untuk mengkonservasi dan mempromosikan pengetahuan masyarakat adat di seluruh dunia. Komite Pengarah untuk program ini terdiri dari seorang koordinator jenderal dan delapan koordinator regional, yang masing-masing mewakili organisasi masyarakat adat. Program ini di dukung oleh UNDP, Pusat Penelitian Pembangunan Internasional (*International Development Research Centre*) dan Kerjasama Pembangunan Swiss (*Swiss Development Cooperation*).

Program Pengetahuan Masyarakat Adat memiliki tiga tujuan:

- mempromosikan partisipasi organisasi masyarakat adat dalam berbagai proses internasional dan konferensi yang menyangkut masyarakat adat, seperti Konferensi Para Pihak dari Konvensi Keanekaragaman Hayati yang dilakukan setiap tahun
- mempromosikan dan mengkonservasi pengetahuan masyarakat adat melalui, misalnya proyek-proyek penelitian yang dirancang dan dilakukan oleh organisasi masyarakat adat di bidang hukum adat dan hak-hak atas sumberdaya tradisional
- mengalokasikan dana bagi inisiatif swadaya masyarakat adat dalam mengatasi masalah pengentasan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia dan membangun organisasi pada tingkat kelompok masyarakat.

Dari tiga proyek Program Pengetahuan Masyarakat Adat yang dibiayai oleh UNDP tersebut, dua berada di Asia dan satu di Amerika Selatan. Ketiga program tersebut baru saja dievaluasi dan hasilnya sangat positif. Perhatian khusus diberikan kepada proyek di hutan Amazon Yana Yacu Sacha di Ekuador. Proyek tersebut disusun untuk mengembalikan dan mengembangkan pengetahuan adat untuk konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati hutan Amazon tersebut. Proyek ini bertujuan menciptakan model pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengetahuan adat tradisional di Amazon. Keputusan untuk memperpanjang fase kedua Program tersebut akan diputuskan oleh Komite Pengarah.

Program Regional dan Nasional UNDP yang melibatkan Masyarakat Adat

UNDP juga mendukung masyarakat adat dalam kegiatan program pembangunan nasional dan regional UNDP. Sebagian besar program tersebut cenderung fokus pada bidang-bidang: perbaikan standar kehidupan; pengembangan teknologi dan ekonomi; pelestarian sumber daya alam dan konservasi lingkungan; dan revitalisasi budaya.

Contoh yang menarik dari program regional UNDP adalah Program Regional Asia Tenggara: Programme Masyarakat yang Tinggal di Dataran Tinggi (*Highland Peoples Programme, HPP*). Program tersebut, yang baru-baru ini menyelesaikan fase pertamanya, mencakup empat wilayah negara yang berbeda di Sub Region Mekong: Thailand, Kamboja, Lao PDR dan Vietnam. Wilayah program tersebut merupakan tempat tinggal bagi 11 juta masyarakat adat. Dengan keterlibatan erat organisasi adat, program tersebut berfokus pada perbaikan kemiskinan dengan mengaplikasikan pendekatan yang partisipatif, tidak terpusat atau bersifat desentralisasi dan mengikuti suara dari arus bawah (*bottom-up*). Program tersebut membangun mekanisme dan prosedur yang mendorong terciptanya dialog dan saling berbagi informasi antara para pihak yang terlibat, yaitu pemerintah dan organisasi masyarakat adat, menyangkut pembangunan masyarakat dataran tinggi pada tingkat regional, nasional dan lokal. Di Kamboja, Program ini menitikberatkan pada pemberian dukungan kepada komite antar menteri dan pengembangan Pedoman Kebijakan untuk pembangunan masyarakat di dataran tinggi. Pedoman tersebut disusun dengan partisipasi luas dari tingkat akar rumput dan tingkat menengah serta partisipasi di tingkat regional.

Memperkuat keterlibatan UNDP dengan Masyarakat Adat

Pada tahun 1999, UNDP melakukan dua kali konsultasi dengan para pemimpin organisasi masyarakat adat untuk membahas antara lain, isu prioritas masyarakat adat dan bagaimana cara terbaik membangun kemitraan dengan UNDP. Konsultasi yang berjudul “Masyarakat Adat dan UNDP: Memperkuat Kemitraan Bersama” tersebut diselenggarakan di Jenewa pada bulan Juli 1999. Konsultasi tersebut mendorong UNDP untuk bekerja dengan masyarakat adat. Sejalan dengan komitmen yang dibuat pada saat konsultasi tersebut, UNDP memprioritaskan pembuatan sebuah kebijakan, lengkap dengan pedoman pelaksanaannya, yang akan digunakan oleh kantor di negara-negara perwakilan dan di kantor pusat UNDP. Selain itu, UNDP juga menitikberatkan perhatiannya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat adat dan partisipasinya dalam sistem PBB dan pertemuan-pertemuan kunci tingkat global.

Komite Penasehat Organisasi Masyarakat sipil kepada Pimpinan dan Manajer Senior UNDP

UNDP membentuk secara formal Komite Penasihat Organisasi Masyarakat sipil atau *Civil Society Organisation* (CSO) kepada Badan Pengelola UNDP pertama kalinya pada bulan Mei 2000. Komite Penasihat ini memberikan arahan-arahan strategis berbagai isu kebijakan dari masalah globalisasi, perdagangan dan pengentasan kemiskinan, hingga pencegahan konflik dan hak-hak asasi manusia. Komite Penasihat tersebut terdiri dari 14 orang anggota yang merupakan para pengambil kebijakan dalam Organisasi Masyarakat sipil, termasuk Direktur dari Organisasi Masyarakat Adat. Para anggota Komite memberikan pertimbangan kritis atas berbagai isu yang menyangkut masyarakat madani dan masyarakat adat. Pada peresmian Komite Pengarah Organisasi Masyarakat sipil, pemimpin UNDP –Mark Malloch Brown- menyatakan komitmen pribadinya untuk isu-isu masyarakat adat dan menekankan pentingnya suatu kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan bagi masyarakat adat, yang disertai pedoman operasional bagi kebijakan tersebut.

Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan UNDP

Pertemuan badan eksekutif UNDP merupakan sebuah pertemuan publik dimana masyarakat adat, LSM dan individual dapat terlibat sebagai pengamat. Sebelum pertemuan tersebut berlangsung, wakil LSM dapat meminta persetujuan badan eksekutif untuk mendapatkan kesempatan berbicara dan menyampaikan pernyataannya. Penting untuk dicatat bahwa UNDP tidak menyelenggarakan pertemuan reguler untuk isu-isu masyarakat adat dan pertemuan khusus atau *ad hoc*. Konsultasi yang menyangkut isu tersebut biasanya diselenggarakan atas permintaan dari kelompok-kelompok atau wakil-wakil masyarakat adat.

UNDP juga berupaya untuk melibatkan masyarakat adat dalam berbagai proses kebijakan. Staf UNDP di tingkat regional dan nasional melakukan konsultasi dengan wakil-wakil dan kelompok-kelompok masyarakat adat mengenai program-program yang dapat memberikan dampak bagi kelompok adat. UNDP mendukung keterlibatan masyarakat adat dalam merancang, merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang mendukung kelompok masyarakat adat.

Jika anda menginginkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan UNDP yang berkaitan dengan masyarakat adat, silahkan menghubungi kantor perwakilan UNDP di negara anda atau Team Masyarakat sipil (*Civil Society Team*) di Biro “*Resources and Strategic Partnership*” di kantor pusat UNDP di New York.

Civil Society Team

Bureau for Resources and Strategic Partnerships

United Nations Development Programme

One United Nations Plaza

New York, NY 10017

USA

Website: www.undp.org

Indigenous Peoples' Website: www.undp.org/csopp/CSO/NewFiles/ipindex.html

Tel: 1-212-906-5316

Fax: 1-212-906-5313